

DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i6><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received: 22 Juli 2026 | Revised: 03 September 2026 | Accepted: 17 Oktober 2026

## Disinformasi Digital sebagai Ancaman Keamanan Non-Tradisional: Konstruksi dan Kontestasi Narasi Laut China Selatan dalam Diplomasi Digital ASEAN

**Annidya Indirasari<sup>1</sup>, Mansur Juned<sup>2</sup>**<sup>1</sup>UPN "Veteran", Jakarta, Indonesia, [annidyaindirasari@gmail.com](mailto:annidyaindirasari@gmail.com)<sup>2</sup>UPN "Veteran", Jakarta, Indonesia, [mansurjuned@upnvj.ac.id](mailto:mansurjuned@upnvj.ac.id)Corresponding Author: [mansurjuned@upnvj.ac.id](mailto:mansurjuned@upnvj.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract:** *This article examines digital disinformation as a non-traditional security threat in the South China Sea dispute through the case study of Operation Naval Gazing. The study aims to analyze how digital disinformation operations are constructed as security issues through the securitization framework of the Copenhagen School. Employing a qualitative research design with a case study approach, this research analyzes documentary evidence drawn from reports published by international institutions and relevant academic literature. The findings demonstrate that the Philippine government acts as the securitizing actor by framing foreign disinformation operations as an existential threat to national information integrity, political stability, and the legitimacy of its maritime claims. Operation Naval Gazing utilized networks of inauthentic accounts supported by artificial intelligence technologies to shape public perceptions and justify the adoption of extraordinary measures. At the regional level, ASEAN's digital diplomacy remains predominantly normative and has yet to develop an effective collective response to Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI). The study argues that strengthening ASEAN's digital diplomacy requires a transition from a reactive and norm-based approach toward a more preventive, operational, and coordinated regional mechanism for addressing transnational digital disinformation.*

**Keywords:** *Digital Disinformation, Operation Naval Gazing, Securitization, Non-Traditional Security, ASEAN Digital Diplomacy*

**Abstrak:** Artikel ini mengkaji disinformasi digital sebagai ancaman keamanan non-tradisional dalam sengketa laut cina selatan dengan studi kasus *Operation Naval Gazing*. Penelitian bertujuan menganalisis bagaimana operasi disinformasi dikonstruksi sebagai isu keamanan melalui perspektif teori sekuritas *Copenhagen School*. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik analisis dokumen terhadap laporan lembaga internasional serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Filipina sebagai *securitizing actor* yang membingkai operasi disinformasi asing sebagai ancaman eksistensial terhadap integritas informasi nasional, stabilitas politik, dan legitimasi klaim maritim. *Naval Gazing* memanfaatkan jaringan akun tidak autentik berbasis kecerdasan

buatan untuk membentuk persepsi publik dan mendorong penerapan *extraordinary measures*. Ditingkat regional, diplomasi digital ASEAN masih bersifat normative sehingga belum mampu merespon operasi *Foreign Information Manipulation and Interference* secara kolektif. Oleh karena itu diperlukan penguatan mekanisme diplomasi digital ASEAN yang lebih preventif dan operasional.

**Kata Kunci:** Disinformasi Digital, *Operation Naval Gazing*, Sekuritisasi, Keamanan Non-Tradisional, Diplomasi Digital ASEAN

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah karakter interaksi internasional secara fundamental. Digitalisasi tidak hanya mempercepat arus informasi lintas negara, tetapi juga menciptakan ruang kontestasi baru yang memungkinkan aktor negara maupun non-negara memengaruhi persepsi publik secara masif melalui media digital. Dalam perkembangan tersebut, informasi tidak lagi dipandang sebagai sekedar sarana komunikasi, melainkan telah menjadi instrumen strategis yang digunakan untuk membangun legitimasi politik, mempengaruhi opini publik, dan membentuk lingkungan keamanan internasional. Perubahan ini menandai bergesernya karakter konflik kontemporer dari dominasi penggunaan kekuatan militer menuju kompetisi yang juga berlangsung melalui penguasaan narasi di ruang digital, sehingga keamanan internasional tidak lagi hanya ditentukan oleh superioritas material, tetapi juga oleh kemampuan mengendalikan informasi dan persepsi (United Nations Development Programme, 1994).

Fenomena tersebut mendorong munculnya disinformasi digital sebagai salah satu tantangan utama dalam studi keamanan non-tradisional (*non-traditional security*). Berbeda dengan *misinformation* yang umumnya disebarkan tanpa unsur kesengajaan, disinformasi merupakan produksi dan penyebaran informasi yang sengaja dimanipulasi untuk memengaruhi perilaku politik, mengubah persepsi publik, serta melemahkan legitimasi institusi tertentu. Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard menunjukkan bahwa manipulasi informasi melalui media digital telah berkembang menjadi praktik sistematis yang dijalankan negara melalui jaringan media sosial, akun otomatis (*bots*), maupun operasi pengaruh (*information operations*) yang terorganisasi (Bradshaw & Howard, 2019). Sementara itu, Lene Hansen dan Helen Nissenbaum menjelaskan bahwa ancaman di ruang siber tidak bersifat objektif semata, tetapi dikonstruksi melalui praktik diskursif yang menentukan siapa yang dipersepsikan sebagai ancaman dan terhadap objek keamanan apa ancaman tersebut diarahkan ((Hansen & Nissenbaum, 2009). Dengan demikian, disinformasi tidak hanya menjadi persoalan komunikasi digital, tetapi juga merupakan proses politik yang dapat mengubah suatu isu menjadi agenda keamanan melalui mekanisme sekuritisasi.

Salah satu konteks yang memperlihatkan transformasi tersebut adalah sengketa Laut China Selatan (*South China Sea*). Selama beberapa dekade, sengketa ini lebih banyak dipahami sebagai konflik keamanan tradisional yang berpusat pada klaim kedaulatan, delimitasi maritim, pembangunan instalasi militer, dan rivalitas strategis antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan sejumlah negara pengklaim seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Namun, dalam satu dekade terakhir arena kontestasi berkembang ke ruang digital melalui pertarungan narasi (*battle of narratives*) yang berupaya membentuk legitimasi atas klaim maritim masing-masing pihak. Berbagai operasi informasi dilakukan untuk memengaruhi persepsi masyarakat domestik maupun internasional terhadap konflik tersebut sehingga ruang siber menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika sengketa Laut China Selatan (Buzan et al., 1998). Penelitian *ISEAS–Yusof Ishak Institute* menunjukkan bahwa operasi *Foreign Information Manipulation and Interference* (FIMI) terkait Laut China Selatan

melibatkan media yang dikendalikan negara, *influencer* yang berafiliasi dengan pemerintah Tiongkok, jaringan proksi, hingga akun-akun tidak autentik yang secara sistematis memperkuat penyebaran narasi tertentu. Operasi tersebut cenderung meningkat setelah Filipina mengambil langkah yang memperkuat posisi hukumnya di Laut China Selatan, termasuk melalui peningkatan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat dan kebijakan domestik mengenai wilayah maritim (ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2024). Narasi yang dibangun umumnya menegaskan klaim historis Tiongkok atas Laut China Selatan, menggambarkan Filipina sebagai *proxy* Amerika Serikat, serta membangun persepsi bahwa konfrontasi dengan Tiongkok hanya akan memperbesar risiko konflik regional.

Di antara berbagai operasi disinformasi tersebut, *Operation Naval Gazing* merupakan salah satu kasus yang paling representatif untuk menjelaskan bagaimana disinformasi dikonstruksi sebagai instrumen geopolitik. Berbeda dengan berbagai kampanye propaganda digital lain yang bersifat sporadis, operasi ini memperlihatkan pola yang terorganisasi, berkelanjutan, dan terdokumentasi secara empiris melalui investigasi lembaga independen sehingga menyediakan bukti yang relatif kuat untuk dianalisis menggunakan teori sekuritisasi. Laporan *International Institute for Strategic Studies* (IISS) berdasarkan investigasi Graphika mengidentifikasi bahwa *Operation Naval Gazing* berasal dari Provinsi Fujian, Tiongkok, dengan memanfaatkan akun-akun palsu yang menggunakan kombinasi foto hasil pencurian identitas dan gambar profil yang dihasilkan melalui kecerdasan buatan (*AI-generated profile images*). Awalnya berfokus pada isu Taiwan, operasi tersebut kemudian mengalihkan targetnya kepada Filipina sejak 2018 dengan menyebarkan narasi yang mendukung kebijakan Presiden Rodrigo Duterte sekaligus memperkuat pengaruh strategis Tiongkok di Asia Tenggara (International Institute for Strategic Studies, 2024; Graphika, 2024).

Kasus *Operation Naval Gazing* menjadi penting karena memperlihatkan bahwa ancaman utama tidak lagi berada pada kemampuan militer semata, melainkan pada kemampuan aktor untuk membentuk persepsi mengenai siapa yang benar, siapa yang mengancam, dan bagaimana publik memahami sengketa Laut China Selatan. Dalam perspektif *Copenhagen School*, proses tersebut merupakan inti dari sekuritisasi, yakni ketika suatu isu berhasil dikonstruksi sebagai ancaman eksistensial melalui praktik diskursif yang diterima oleh audiens tertentu sehingga membuka ruang bagi tindakan politik yang sebelumnya tidak dianggap perlu. Meskipun penelitian mengenai disinformasi digital di Laut China Selatan terus berkembang, sebagian besar kajian masih berfokus pada pemetaan aktor, pola penyebaran informasi, maupun perkembangan teknologi digital. Kajian lain lebih banyak membahas diplomasi digital ASEAN atau keamanan siber sebagai isu yang berdiri sendiri. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) mengenai bagaimana operasi disinformasi tertentu diproses sebagai ancaman keamanan melalui mekanisme sekuritisasi serta bagaimana proses tersebut berimplikasi terhadap kapasitas diplomasi digital ASEAN. Padahal, memahami proses sekuritisasi jauh lebih penting dibandingkan sekadar mengidentifikasi keberadaan disinformasi, karena ancaman keamanan tidak muncul secara otomatis, melainkan dibentuk melalui interaksi antara aktor, objek rujukan (*referent object*), audiens, dan respons politik yang menyertainya.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, artikel ini berargumen bahwa *Operation Naval Gazing* merupakan bentuk operasi disinformasi digital yang tidak hanya bertujuan memengaruhi opini publik Filipina, tetapi juga mengonstruksi ancaman terhadap legitimasi klaim maritim dan stabilitas kawasan melalui proses sekuritisasi di ruang digital. Oleh karena itu, ASEAN diposisikan bukan sebagai objek utama penelitian, melainkan sebagai aktor regional yang menghadapi implikasi dari berkembangnya ancaman tersebut terhadap efektivitas diplomasi digital kawasan. Dengan menempatkan *Operation Naval Gazing* sebagai studi kasus utama, artikel ini berupaya menunjukkan bagaimana transformasi konflik dari ruang maritim menuju ruang digital menuntut perluasan cara pandang terhadap keamanan non-

tradisional di Asia Tenggara. Adanya suatu karakter tata Kelola ruang digital di Asia Tenggara maka terbentuk oleh kecenderungan negara-negara Asean untuk memprioritaskan stabilitas politik dan harmoni social dibandingkan liberalisasi ruang digital. Orientasi tersebut mencermintakan pengaruh nilai-nilai komunal yang masih menjadi landasan dalam pembentukan kebijakan digital Kawasan (Juned,2023). Guna membedah fenomena ini secara komprehensif, kerangka teoritis yang digunakan Adalah Teori Sekuritisasi (Securitization Theory) yang dikembangkan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde melalui Copenhagen School. Berbeda dengan paradigma keamanan tradisional yang memandang ancaman sebagai suatu yang bersifat objektif dan material, *Copenhagen School* berangkat dari perspektif konstruktivisme yang memandang keamanan sebagai hasil konstruksi sosial, melalui proses diskursif. Dengan demikian, suatu isu tidak secara otomatis menjadi ancaman keamanan, melainkan harus lebih dahulu dikonstruksi sebagai ancaman eksistensial melalui praktik politik dan bahasa sebelum memperoleh legitimasi untuk ditangani melalui kebijakan luar biasa (*extraordinary measures*) (Buzan et al., 1998).

Menurut Buzan, Wæver, dan de Wilde, sekuritisasi merupakan suatu *speech act*, yaitu tindakan tutur ketika seorang aktor politik menyatakan bahwa suatu isu mengancam keberlangsungan objek tertentu sehingga memerlukan tindakan yang berada di luar prosedur politik normal (Buzan et al., 1998). Dengan kata lain, ancaman keamanan bukan ditentukan oleh tingkat bahaya objektif suatu fenomena, tetapi oleh keberhasilan aktor politik meyakinkan audiens bahwa fenomena tersebut merupakan ancaman eksistensial yang membutuhkan respons segera. Proses sekuritisasi ini ditopang oleh empat elemen utama, yaitu *securitizing actor* (aktor yang mengonstruksi ancaman), *referent object* (pihak atau nilai yang terancam dan perlu dilindungi), *audience* (kelompok yang menerima atau menolak klaim ancaman), serta *extraordinary measures* (tindakan luar biasa yang memperoleh legitimasi setelah sekuritisasi berhasil) (Wæver,1995). Keempat elemen ini saling berhubungan secara kausal untuk membentuk analisis komprehensif mengenai bagaimana disinformasi digital bertransformasi dari sekadar problem komunikasi menjadi instrumen politik yang memengaruhi dinamika geopolitik kawasan.

Dalam mengkaji sifat dari ancaman ini, penelitian ini bersandar pada konsep Keamanan Non-Tradisional (*Non-Traditional Security/NTS*) yang mencakup spektrum isu lintas batas pasca-Perang Dingin, seperti keamanan siber dan disinformasi digital, yang mampu mengganggu stabilitas politik tanpa harus melibatkan kekuatan militer konvensional (Caballero-Anthony, 2016). Di kawasan Asia Tenggara, ASEAN telah mengintegrasikan pendekatan ini ke dalam *ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025* untuk mendorong kerja sama kolektif lintas sektoral dalam menghadapi ancaman transnasional (Association of Southeast Asian Nations, 2015). Melalui integrasi konsep NTS sebagai karakter ancaman dan teori sekuritisasi sebagai mekanisme konstruksinya, artikel ini menyusun sebuah kerangka analisis yang menempatkan Operation Naval Gazing sebagai pemantik proses sekuritisasi. Ketika narasi disinformasi digital tersebut berhasil memengaruhi persepsi publik dan diterima oleh audiens, proses sekuritisasi ini menciptakan legitimasi atas lahirnya respons kebijakan baru, yang dalam konteks ini dianalisis dampaknya terhadap efektivitas diplomasi digital ASEAN.

Berdasarkan perumusan latar belakang, kerangka teoretis, dan rumusan masalah tersebut, artikel ini secara naratif menetapkan tujuan penelitian untuk menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana proses konstruksi narasi disinformasi dalam *Operation Naval Gazing* membentuk ancaman keamanan pada sengketa Laut China Selatan? Kedua, bagaimana proses sekuritisasi terhadap disinformasi digital tersebut dapat dijelaskan melalui kerangka *Copenhagen School*? Ketiga, bagaimana implikasi proses sekuritisasi tersebut terhadap diplomasi digital ASEAN dalam merespons ancaman keamanan non-tradisional di kawasan? Guna menjawab rangkaian pertanyaan tersebut, penelitian ini menerapkan metode

kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*desk research*) melalui analisis mendalam terhadap laporan ISEAS Yusof Ishak Institute, *International Institute for Strategic Studies* (IISS), Graphika, dokumen resmi ASEAN, serta literatur akademik yang relevan.

## METODE

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami proses konstruksi ancaman keamanan melalui narasi disinformasi digital, bukan mengukur hubungan kausal secara statistik maupun menguji hipotesis kuantitatif. Dengan demikian, fokus penelitian terletak pada interpretasi terhadap berbagai dokumen, laporan penelitian, dan publikasi kebijakan yang berkaitan dengan operasi disinformasi digital dalam sengketa Laut China Selatan (Creswell, 2018) yang dapat di peroleh dari dokumen resmi Asean, publikasi pemerintah, laporan lembaga internasional, artikel ilmiah, serta sumber media yang relevan dengan isu disinformasi digital dan narasi laut China Selatan sehingga pada data analisis secara tematik untuk mengidentifikasi kontruksi narasi, bentuk disinformasi, serta implikasinya terhadap keamanan non-tradisional dan diplomasi digital ASEAN.

Melalui metode *desk research*, penelitian ini memanfaatkan dokumen tertulis sebagai sumber utama untuk merekonstruksi fenomena sekuritisasi disinformasi digital berdasarkan bukti empiris yang dapat ditelusuri dan diverifikasi oleh berbagai lembaga independen. Pendekatan ini juga menggunakan analisis dokumen kualitatif untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan membandingkan konstruksi narasi mengenai Laut China Selatan dalam konteks disinformasi digital di Filipina, dalam penelitian ini tidak dapat dipahami sebagai sekadar pengumpulan referensi, tetapi sebagai prosedur sistematis untuk membangun korpus dokumen, menilai kelayakan sumber, mengekstraksi data, dan melakukan interpretasi terhadap pola narasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Pendekatan tersebut mengikuti prinsip analisis dokumen yang menempatkan dokumen sebagai sumber data kualitatif yang perlu diseleksi, dievaluasi kredibilitasnya, dan dianalisis berdasarkan konteks produksinya (Bowen, 2009). Oleh karena itu dokumen tidak hanya diperlakukan sebagai sumber informasi yang dapat dibuktikan dari dokumen tersebut dengan mempertimbangkan siapa yang menerbitkannya, kepetingan institusional yang melatarbelakanginya, konteks penerbitan, serta batas informasi yang dapat dibuktikan dari dokumen tersebut.

Penelitian ini menggunakan kerangka sekuritisasi guna menganalisis bagaimana isu Laut China Selatan dikonstruksikan sebagai persoalan keamanan melalui narasi digital. Namun, penelitian tidak hanya mengasumsikan bahwa keberadaan narasi bersifat mengancam secara otomatis namun menunjukkan sisi keberhasilan sekuritisasi. Analisis inilah yang membedakan antara *securitizing move*, dimana artikulasi suatu isu sebagai ancaman eksistensial, dan keberhasilan sekuritisasi yang memerlukan perhatian terhadap konteks, aktor, serta penerimaan audiens. Dengan demikian, keberadaan narasi digital diperlakukan sebagai bukti konstruksi ancaman, sedangkan pada klaim mengenai keberhasilan sekuritisasi hanya dibuat apabila terdapat bukti yang memadai mengenai respons atau penerimaan audiens.

Objek penelitian difokuskan pada *Operation Naval Gazing*, yaitu operasi disinformasi digital yang diidentifikasi kepada negara Filipina dalam konteks sengketa Laut China Selatan, sehingga dapat dipusatkan ke analisis satu studi kasus. Hal ini dilakukan agar penelitian memiliki batasan yang jelas dan memungkinkan analisis mendalam mengenai hubungan antara disinformasi digital, konstruksi ancaman, serta proses sekuritisasi. Pemilihan studi kasus ini juga didasarkan pada tersedianya dokumentasi investigatif mengenai operasi tersebut, khususnya laporan Graphika yang diterbitkan pada 22 September 2020 (Nimmo et al., 2020). Dalam penelitian ini, laporan Graphika diposisikan sebagai sumber empiris mengenai karakteristik dan aktivitas operasi yang diteliti, bukan sebagai bukti bahwa pemerintah Filipina telah berhasil melakukan sekuritisasi. Keberadaan operasi disinformasi dan keberhasilan

proses sekuritisasi merupakan dua persoalan analitis yang berbeda sehingga harus diperiksa melalui bukti yang berbeda pula.

Untuk menghindari pencampuran peristiwa yang berbeda secara temporal dan analitis, penelitian ini membedakan dua kelompok dokumen. Kelompok pertama adalah dokumen mengenai *Operation Naval Gazing*, yang berfokus pada periode operasi yang dilaporkan, terutama 2016–2020. Kelompok kedua adalah dokumen mengenai respons pemerintah dan institusi keamanan Filipina terhadap disinformasi dan kontestasi narasi Laut China Selatan, terutama publikasi kebijakan dan pernyataan resmi pada 2023–2024. Kelompok kedua digunakan untuk menelaah bagaimana isu disinformasi dan informasi mengenai Laut China Selatan dikonstruksikan sebagai bentuk persoalan keamanan oleh aktor pemerintah. Pemisahan ini penting karena adanya suatu respons kebijakan pada 2023–2024 yang tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai akibat langsung dari *Operation Naval Gazing* tanpa bukti empiris yang menunjukkan hubungan kausal di antara keduanya.

Sumber data penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari dokumen akademik, laporan investigatif, publikasi institusional, dan dokumen resmi pemerintah. Sumber dipilih berdasarkan relevansi terhadap fokus penelitian, kredibilitas penerbit, kejelasan waktu penerbitan, serta kemampuannya mendukung pemeriksaan terhadap unsur-unsur sekuritisasi. Meskipun sebagian besar pada data berupa dokumen sekunder, penelitian juga menggunakan pernyataan dan publikasi resmi institusi pemerintah sebagai bukti dokumenter primer mengenai posisi, narasi, dan tindakan institusi yang bersangkutan.

Data mengenai *Operation Naval Gazing* terutama yang bersumber dari laporan Graphika yang diterbitkan pada 22 September 2020. Laporan tersebut menguraikan karakteristik jaringan akun yang teridentifikasi, pola aktivitasnya, serta narasi yang berkaitan dengan Filipina dan Laut China Selatan (Nimmo et al., 2020). Laporan *Meta* mengenai tindakan terhadap jaringan perilaku tidak autentik terkoordinasi pada September 2020 digunakan sebagai sumber pembandingan untuk memeriksa informasi mengenai akun, platform, asal jaringan, dan tema konten yang dilaporkan (*Meta*, 2020). Penggunaan kedua sumber ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa seluruh platform digital mengalami penyebaran yang sama luas. Sebaliknya, penelitian memperhatikan batas temuan yang dinyatakan dalam setiap laporan, termasuk keterbatasan aktivitas lintas platform yang diidentifikasi oleh Graphika. Untuk menganalisis konstruksi ancaman oleh aktor pemerintah Filipina, penelitian ini menggunakan publikasi resmi *Philippine Information Agency* (PIA) mengenai peluncuran kegiatan komunikasi untuk melawan misinformasi Laut Filipina Barat pada 12 Februari 2024 serta seruan *National Task Force for the West Philippine Sea* (NTF-WPS) kepada masyarakat untuk membantu memerangi disinformasi pada 18 Maret 2024 (*Philippine Information Agency*, 2024a, 2024b). Kedua dokumen tersebut digunakan untuk mengidentifikasi aktor yang menyampaikan pernyataan, bentuk ancaman yang dikonstruksikan, audiens yang dituju, dan tindakan yang dianjurkan. Selain itu, publikasi resmi *Armed Forces of the Philippines* mengenai rencana komunikasi *COMPLAN* “Mulat”, yang diluncurkan pada Juni 2024 dan diberitakan pada 4 Juli 2024, digunakan untuk mengkaji respons institusional terhadap persoalan informasi mengenai Laut Filipina Barat (*Armed Forces of the Philippines*, 2024).

Untuk memperluas konteks analisis, penelitian menggunakan publikasi ISEAS–Yusof Ishak Institute, khususnya tulisan Ibarra dan Arugay (2024) mengenai inisiatif transparansi Filipina di Laut China Selatan. Sumber ini digunakan sebagai kajian pada analitis sekunder mengenai kebijakan transparansi dan dukungan publik terhadap pendekatan tersebut, bukan sebagai bukti tunggal bahwa masyarakat telah menerima konstruksi disinformasi sebagai ancaman eksistensial. Penelitian juga memanfaatkan kajian Lawrence N. Llanita (2024) yang diterbitkan oleh *National Defense College of the Philippines* untuk memahami persoalan manipulasi informasi asing dan implikasinya bagi Filipina. Kajian *Freedom House* (2022)

dapat juga digunakan sebagai sumber kontekstual tambahan mengenai pengaruh media Beijing di Filipina.

Adapun dokumen ASEAN, termasuk *ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025 (Association of Southeast Asian Nations, 2015)*, digunakan untuk memeriksa kerangka normatif dan institusional kerja sama keamanan kawasan. Dokumen ASEAN tersebut tidak diperlakukan sebagai bukti langsung bahwa ASEAN telah memberikan respons kolektif terhadap *Operation Naval Gazing*. Relevansinya terletak pada upaya mengidentifikasi ruang lingkup kerja sama keamanan politik dan keterkaitannya dengan persoalan keamanan informasi. Klaim mengenai respons konkret ASEAN hanya akan diajukan apabila didukung oleh dokumen, pernyataan, atau keputusan institusional yang secara langsung menunjukkan respons tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah, organisasi regional, lembaga penelitian, dan publikasi akademik. Dokumen yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan empat kriteria: (1) relevansi dengan *Operation Naval Gazing*, *disinformasi digital*, sekuritisasi, atau diplomasi digital ASEAN; (2) kejelasan identitas penerbit dan waktu penerbitan; (3) tersedianya informasi yang dapat ditelusuri untuk mendukung klaim empiris; dan (4) keterkaitan dengan unsur analisis, seperti aktor sekuritisasi, konstruksi ancaman, objek rujukan, *audiens*, respons kebijakan, dan penerimaan *audiens*. Dokumen yang tidak dapat diidentifikasi secara memadai atau tidak menyediakan bukti yang relevan tidak digunakan sebagai dasar utama penarikan kesimpulan. Untuk menjaga konsistensi analisis, informasi dari setiap dokumen dicatat dalam matriks data yang mencakup nama penerbit, tahun penerbitan, jenis sumber, periode peristiwa yang dibahas, aktor yang terlibat, klaim mengenai ancaman, objek rujukan, audiens yang dituju, respons atau tindakan yang dilaporkan, serta keterbatasan bukti. Matriks ini digunakan untuk membandingkan temuan antar-sumber sekaligus membedakan pernyataan resmi, temuan investigatif, dan interpretasi akademik.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) yang dipadukan dengan analisis tematik berdasarkan kerangka teori sekuritisasi Copenhagen School. Seluruh dokumen yang telah dikumpulkan dikaji secara sistematis melalui proses pemilahan data, kategorisasi, interpretasi, dan sintesis. Kerangka analisis mengacu pada pemahaman sekuritisasi sebagai proses ketika suatu isu dikonstruksikan sebagai ancaman keamanan, disampaikan oleh aktor tertentu kepada audiens, dan memperoleh penerimaan yang memungkinkan legitimasi tindakan penanganan tertentu (Buzan et al., 1998). Analisis juga perlu mempertimbangkan kritik terhadap pendekatan yang terlalu berpusat pada pernyataan aktor, dengan menempatkan audiens, konteks politik, dan bukti penerimaan sebagai unsur penting dalam menilai hasil proses sekuritisasi (Balzacq, 2005; Côté, 2016). Dengan demikian, dapat ditemukannya pernyataan yang menggambarkan disinformasi sebagai ancaman belum cukup untuk menyimpulkan bahwa sekuritisasi telah berhasil.

Pada prosedur analisis dilakukan melalui empat tahapan utama dimana: Pertama, identifikasi dan kategorisasi narasi disinformasi. Pada tahap ini, penelitian mengidentifikasi tema, sasaran, pola penyebaran, serta representasi Filipina dan Laut China Selatan yang dilaporkan dalam sumber mengenai *Operation Naval Gazing*. Analisis ini dibatasi pada narasi dan aktivitas yang benar-benar terdokumentasi, sehingga penelitian tidak mengasumsikan adanya jangkauan lintas *platform* atau dampak politik yang tidak dibuktikan oleh sumber. Kedua, identifikasi aktor sekuritisasi dan konstruksi ancaman. Penelitian memeriksa pernyataan resmi dari institusi atau pejabat Filipina untuk mengidentifikasi siapa saja yang menyampaikan klaim, kapan klaim disampaikan, kepada siapa klaim ditujukan, serta bagaimana disinformasi atau persoalan informasi Laut China Selatan dikaitkan dengan kedaulatan, kepentingan nasional, persatuan masyarakat, atau keamanan informasi. Laporan Graphika dan Meta tidak dikategorikan sebagai tindakan sekuritisasi pemerintah Filipina

karena keduanya merupakan sumber investigatif, bukan aktor pemerintah yang melakukan klaim sekuritisasi atas nama negara.

Ketiga, analisis objek rujukan dan penerimaan audiens. Penelitian mengidentifikasi objek yang diklaim perlu dilindungi (*referent object*), seperti kedaulatan, hak maritim, kepentingan nasional, atau integritas lingkungan informasi. Selanjutnya, penelitian memeriksa bukti mengenai respons audiens, termasuk dukungan publik, tanggapan masyarakat, atau legitimasi terhadap kebijakan yang relevan. Namun, dukungan terhadap transparansi atau kebijakan pemerintah tidak langsung ditafsirkan sebagai penerimaan terhadap klaim bahwa disinformasi merupakan ancaman eksistensial. Penerimaan audiens hanya dinilai berdasarkan bukti yang secara substantif berkaitan dengan klaim ancaman yang dianalisis. Keempat, analisis respons kebijakan dan penilaian hasil sekuritisasi. Penelitian mengidentifikasi tindakan yang diambil oleh institusi pemerintah atau keamanan, dasar kelembagaan tindakan tersebut, serta hubungannya dengan konstruksi ancaman dan respons audiens. Setiap tindakan kemudian dinilai apakah merupakan kebijakan rutin, peningkatan intensitas kebijakan yang sudah ada, atau tindakan luar biasa yang memerlukan legitimasi khusus. Dengan demikian, program komunikasi, transparansi, dan pemeriksaan fakta tidak secara otomatis dikategorikan sebagai tindakan luar biasa. Penilaian terhadap keberhasilan sekuritisasi dilakukan dengan memeriksa keterhubungan bukti mengenai klaim ancaman, penerimaan audiens, dan legitimasi tindakan kebijakan, bukan hanya berdasarkan keberadaan pernyataan atau program pemerintah.

Seluruh tahapan tersebut dilakukan dengan memperhatikan bukti yang mendukung maupun yang membatasi argumen penelitian. Jika dokumen menunjukkan adanya upaya membingkai disinformasi sebagai ancaman, tetapi belum menunjukkan penerimaan audiens atau legitimasi tindakan luar biasa secara memadai, temuan akan ditafsirkan sebagai proses sekuritisasi yang parsial atau sedang berlangsung, bukan sebagai keberhasilan sekuritisasi yang telah terbukti sepenuhnya. Pendekatan ini digunakan untuk menghindari penarikan kesimpulan kausal yang melampaui bukti empiris yang tersedia. Untuk menghubungkan temuan kasus dengan diplomasi digital ASEAN, penelitian kemudian menelaah kesesuaian dan keterbatasan respons nasional Filipina dengan kerangka kerja sama keamanan kawasan yang tercantum dalam dokumen ASEAN. Analisis ini tidak mengasumsikan bahwa respons Filipina merupakan respons kolektif ASEAN. Implikasi regional hanya dirumuskan berdasarkan bukti yang memperlihatkan hubungan antara narasi, kebijakan, atau kerja sama nasional dan mekanisme institusional ASEAN.

Pada Validitas data dijaga melalui pemeriksaan silang antarsumber, penelusuran asal informasi, dan perbandingan antara klaim yang tercantum dalam dokumen dengan bukti yang tersedia. Pemeriksaan silang dilakukan dengan membandingkan laporan investigatif, publikasi resmi pemerintah, serta kajian akademik atau institusional yang relevan. Setiap sumber dievaluasi berdasarkan tujuan penerbitan, kedekatan dengan peristiwa yang dilaporkan, transparansi informasi, dan keterbatasan cakupan datanya. Penggunaan beberapa sumber tidak secara otomatis dianggap sebagai triangulasi yang memadai. Triangulasi dilakukan apabila sumber yang berbeda menyediakan bukti yang dapat dibandingkan untuk memeriksa klaim yang sama. Sebagai contoh, laporan Graphika dan Meta dapat diperbandingkan untuk memeriksa dokumentasi mengenai jaringan akun dan aktivitas operasi, sedangkan publikasi resmi pemerintah Filipina digunakan untuk menelaah konstruksi ancaman serta respons kebijakan. Kajian ISEAS dan Freedom House digunakan untuk memperkaya interpretasi kontekstual, bukan menggantikan bukti primer mengenai pernyataan atau tindakan pemerintah.

Penelitian juga mempertimbangkan bukti negatif dan keterbatasan data, termasuk tidak ditemukannya bukti yang cukup mengenai penerimaan audiens, tindakan luar biasa, atau hubungan kausal langsung antara *Operation Naval Gazing* dan kebijakan pemerintah Filipina pada periode berikutnya. Pencatatan keterbatasan tersebut menjadi bagian dari proses

interpretasi agar kesimpulan penelitian tetap proporsional terhadap kekuatan bukti yang tersedia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Operation Naval Gazing sebagai Operasi Disinformasi Digital dalam Sengketa Laut China Selatan. Sengketa Laut China Selatan dalam beberapa tahun terakhir tidak lagi berlangsung semata-mata melalui pengerahan kekuatan militer dan diplomasi maritim, tetapi juga melalui kontestasi narasi di ruang digital. Salah satu bentuk operasi informasi yang paling terdokumentasi adalah Operation Naval Gazing, yaitu kampanye disinformasi yang diidentifikasi oleh Graphika dan dianalisis lebih lanjut oleh International Institute for Strategic Studies (IISS) sebagai bagian dari strategi pengaruh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di kawasan Indo-Pasifik (Graphika, 2024; International Institute for Strategic Studies, 2024). Berbeda dengan operasi propaganda digital yang umumnya bersifat sporadis, *Operation Naval Gazing* menunjukkan karakteristik operasi informasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan memiliki tujuan geopolitik yang jelas. Investigasi yang dilakukan oleh Graphika mengidentifikasi bahwa operasi ini dijalankan melalui jaringan akun tidak autentik yang menggunakan kombinasi foto hasil pencurian identitas (*identity theft*) dengan gambar profil yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (*AI-generated profile images*). Pola tersebut memungkinkan akun-akun tersebut tampak sebagai pengguna nyata sehingga meningkatkan kredibilitas narasi yang disebarkan kepada publik (Graphika, 2024; International Institute for Strategic Studies, 2024). Laporan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan jaringan akun tidak autentik (*coordinated inauthentic behaviour*) ini secara masif dirancang untuk membangun kepercayaan di ruang siber. Akibatnya perkembangan mekanisme regional dalam menghadapi operasi disinformasi juga dipengaruhi oleh perubahan tata Kelola digital yang berlangsung secara gradual. Selain dipengaruhi proses lokalisasi norma, dinamika tersebut semakin kompleks karena Asia Tenggara menjadi arena kontekstasi geopolitik Amerika Serikat dan Tiongkok dalam ruang Siber (Juned, 2023).

Laporan International Institute for Strategic Studies (IISS) menjelaskan bahwa operasi tersebut berawal dari kampanye yang berfokus pada isu Taiwan sebelum kemudian mengalihkan perhatian kepada Filipina sejak tahun 2018. Pergeseran tersebut berlangsung bersamaan dengan meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan dan perubahan orientasi kebijakan luar negeri Filipina terhadap Republik Rakyat Tiongkok (International Institute for Strategic Studies, 2024). Penelitian ISEAS–Yusof Ishak Institute menunjukkan bahwa narasi yang diproduksi melalui operasi tersebut memiliki pola yang relatif konsisten, yaitu menegaskan klaim historis Tiongkok atas Laut China Selatan, membingkai Filipina sebagai aktor yang dikendalikan Amerika Serikat, membangun persepsi bahwa kerja sama keamanan dengan Washington akan memicu konflik bersenjata, serta melakukan delegitimasi terhadap pejabat maupun jurnalis yang mengkritik aktivitas Beijing di Kawasan (ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2024). Platform digital seperti YouTube, TikTok, Facebook, dan X menjadi medium utama penyebaran narasi karena tingginya tingkat penetrasi media sosial di Filipina.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa Operation Naval Gazing bukan sekadar penyebaran informasi yang menyesatkan, tetapi merupakan bentuk operasi pengaruh (*information operation*) terorganisasi yang dirancang untuk mengonstruksi realitas politik tertentu guna mendukung kepentingan geopolitik luar negeri. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) generatif semakin meningkatkan kompleksitas operasi tersebut. Laporan European Parliamentary Research Service (EPRS) menunjukkan bahwa teknologi AI generatif memungkinkan produksi konten sintetik (*synthetic media*) seperti deepfake, suara sintetis, dan video manipulatif yang sangat sulit dibedakan dari konten asli, sehingga meningkatkan risiko eskalasi informasi terutama ketika terjadi insiden fisik yang sensitif di wilayah maritim (European Parliamentary Research Service, 2025; Frontiers in

Artificial Intelligence, 2025). Dengan demikian, data empiris menunjukkan bahwa ancaman keamanan kontemporer di Laut China Selatan telah bertransformasi melampaui batas-batas /IO konfrontasi fisik di wilayah laut menuju manipulasi ruang informasi digital.

Analisis Sekuritisasi terhadap Operation Naval Gazing. Dalam perspektif Copenhagen School, ancaman keamanan tidak muncul secara objektif, melainkan melalui proses sekuritisasi yang melibatkan rangkaian diskursif terstruktur (Buzan et al., 1998). Analisis terhadap Operation Naval Gazing disini tidak hanya berfokus pada penilaian tentang benar salahnya fakta informasi, melainkan pada bagaimana disinformasi dikonstruksi secara politik sebagai ancaman eksistensial terhadap suatu objek keamanan tertentu (Wæver, 1995). Dalam konstruksi sekuritisasi ini, securitizing actor diperankan oleh Pemerintah Filipina bersama lembaga riset regional seperti ISEAS dan Graphika ketika mereka secara resmi mengidentifikasi dan mendeklarasikan operasi disinformasi digital asing sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional serta integritas informasi negara. Sebaliknya, kampanye disinformasi asal Tiongkok diposisikan sebagai objek ancaman (*existential threat*).

Adapun referent object atau nilai yang terancam dan perlu dilindungi dalam konteks ini adalah integritas ruang informasi nasional, legitimasi hukum atas klaim maritim Filipina, serta stabilitas politik domestik. Operasi disinformasi digital ini berupaya mendelegitimasi dan melemahkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pertahanan maritim pemerintah Filipina di Laut China Selatan. Kampanye diskursif resmi oleh pemerintah Filipina yang didukung oleh publikasi data investigatif independen berfungsi sebagai tindakan tutur (speech act) yang ditujukan kepada audience (masyarakat Filipina, komunitas regional ASEAN, dan komunitas internasional) (Wæver, 1995). Ketika audiens menerima klaim ancaman tersebut, lahirlah legitimasi politik bagi implementasi kebijakan luar biasa (*extraordinary measures*) untuk menangkal intervensi siber (Buzan et al., 1998; Association of Southeast Asian Nations, 2002). Dengan demikian, objek utama yang disekuritisasi dalam kasus ini bergeser dari ruang geografis fisik (maritim) menuju ruang informasi (information space) sebagai arena baru pertahanan kedaulatan non-tradisional.

Implikasi terhadap Diplomasi Digital ASEAN. Hasil analisis menunjukkan bahwa Operation Naval Gazing tidak hanya berdampak pada dinamika pertahanan domestik Filipina, tetapi juga mengekspos keterbatasan arsitektur keamanan regional ASEAN dalam merespons ancaman disinformasi transnasional di ruang siber. Berbeda dengan sengketa fisik maritim yang dikelola secara prosedural melalui negosiasi Code of Conduct (COC), ancaman perang informasi asimetris ini berkembang jauh melampaui regulasi keamanan fisik konvensional (Buzan et al., 1998; Association of Southeast Asian Nations, 2002). Perundingan COC hingga saat ini masih terlalu berfokus pada perilaku taktis di wilayah perairan fisik, tanpa mengintegrasikan regulasi pertarungan narasi di ruang digital.

ASEAN sesungguhnya telah meluncurkan berbagai kebijakan normatif sektoral seperti ASEAN Digital Masterplan 2025, ASEAN Cybersecurity Cooperation Strategy, serta ASEAN Guidelines on Management of Government Information in Combating Fake News and Disinformation Through the Media (Association of Southeast Asian Nations, 2020, 2021). Namun demikian, dokumen-dokumen ini masih bersifat sukarela (non-binding), berorientasi pada peningkatan kapasitas domestik masing-masing negara, serta belum menyusun mekanisme operasional pertahanan kolektif untuk menangkal intervensi siber asing (Foreign Information Manipulation and Interference/FIMI) secara terintegrasi. Hal ini menyebabkan respon kolektif di tingkat regional masih terfragmentasi akibat disparitas kapabilitas digital antar-negara anggota. Dalam ASEAN Digital Masterplan 2025 menunjukkan bahwa suatu transformasi digital dinarea Kawasan berorientasi pada pendekatan yang dipimpin negara sehingga negara tetap menjadi actor utama dalam pengelolaan ruang digital (Juned, 2023). Kondisi Asean sejalan dengan temuan Juned (2023) bahwa kebijakan digital Asean lebih berorientasi pada pembangunan kapasitas digital dan stabilitas politik dibandingkan

pembangunan kapasitas digital dan stabilitas politik dibandingkan pengembangan mekanisme regional untuk mengelola dinamika interaksi politik di ruang siber. Orientasi tersebut mampu menjelaskan mengapa respons kawasan terhadap operasi FIMI masih bersifat normative dan belum berkembang menjadi mekanisme keamanan kolektif.

Kedepannya, tantangan utama diplomasi digital ASEAN adalah melakukan transformasi peran dari sekadar fasilitator kerja sama teknis menjadi aktor regional yang mampu mengoordinasikan mekanisme pertahanan kedaulatan informasi bersama. Diplomasi digital ASEAN harus didorong untuk merumuskan instrumen preventif yang kokoh, seperti pembentukan jaringan verifikasi fakta (regional fact-checking networks), standarisasi transparansi media berbasis kecerdasan buatan, serta integrasi isu keamanan ruang informasi ke dalam agenda perundingan keamanan strategis di Laut China Selatan. Kegagalan dalam merespons dinamika ini akan melemahkan kredibilitas sentralitas ASEAN dalam memitigasi spektrum ancaman keamanan non-tradisional yang semakin kompleks di era digital.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Operation Naval Gazing* merupakan salah satu bentuk operasi pengaruh digital yang memperlihatkan bagaimana ruang siber menjadi arena kontestasi geopolitik dalam sengketa Laut China Selatan. Berbeda dengan pendekatan keamanan tradisional yang menitikberatkan pada kekuatan militer dan sengketa teritorial, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persaingan geopolitik juga berlangsung melalui produksi dan penyebaran narasi digital yang berupaya memengaruhi persepsi publik serta memperkuat kepentingan strategis di ruang informasi. Laporan Graphika dan Meta mendokumentasikan keberadaan jaringan akun tidak autentik yang menyebarkan konten terkait Filipina, Tiongkok, dan Laut China Selatan (Meta, 2020; Nimmo et al., 2020). Meskipun demikian, temuan tersebut perlu dibaca secara proporsional. Dokumentasi mengenai keberadaan jaringan dan aktivitas disinformasi tidak dengan sendirinya membuktikan luasnya dampak operasi terhadap opini publik, perubahan kebijakan pemerintah, ataupun keberhasilan suatu proses sekuritisasi. Oleh karena itu, kontribusi empiris penelitian ini terletak pada penjelasan mengenai karakter operasi pengaruh digital dan relevansinya terhadap kontestasi keamanan informasi, bukan pada klaim bahwa seluruh dampaknya telah terukur.

Berdasarkan perspektif *Copenhagen School*, penelitian ini menempatkan disinformasi digital sebagai fenomena yang berpotensi dikonstruksikan menjadi persoalan keamanan melalui tindakan aktor politik, tetapi tidak secara otomatis menjadi ancaman keamanan hanya karena keberadaannya telah teridentifikasi. Dalam konteks Filipina, publikasi resmi *Philippine Information Agency* (PIA) pada 12 Februari 2024 mendokumentasikan pernyataan Jonathan Malaya dari *National Security Council* mengenai perlunya pemerintah menangani narasi yang tidak akurat, termasuk narasi yang berasal dari pemerintah Tiongkok. Selanjutnya, pernyataan Jay Tarriela selaku juru bicara *Philippine Coast Guard* untuk NTF-WPS pada 18 Maret 2024 menyerukan keterlibatan masyarakat dalam memerangi misinformasi mengenai Laut Filipina Barat (*Philippine Information Agency*, 2024a, 2024b). Kedua dokumen tersebut memberikan bukti mengenai aktor, konteks, dan arah konstruksi ancaman yang dapat dianalisis melalui kerangka sekuritisasi. Namun, dokumen tersebut tidak secara langsung membuktikan bahwa pernyataan pemerintah Filipina secara khusus merupakan respons terhadap *Operation Naval Gazing*. Hubungan antara operasi tersebut dan konstruksi ancaman dalam pernyataan pemerintah pada periode berikutnya masih memerlukan bukti empiris yang lebih kuat.

Temuan penelitian ini karena itu lebih tepat menunjukkan adanya upaya sekuritisasi yang parsial dan masih berlangsung daripada keberhasilan sekuritisasi secara utuh. Bukti yang tersedia menunjukkan bahwa sejumlah aktor pemerintah Filipina mengaitkan persoalan informasi mengenai Laut Filipina Barat dengan kepentingan nasional, kedaulatan, dan persatuan masyarakat. Akan tetapi, proses sekuritisasi tidak dapat dinyatakan berhasil hanya

berdasarkan keberadaan pernyataan yang membingkai suatu persoalan sebagai ancaman. Penilaian tersebut juga memerlukan bukti mengenai penerimaan audiens terhadap klaim ancaman serta legitimasi tindakan kebijakan yang diambil sebagai konsekuensinya (Balzacq, 2005; Buzan et al., 1998; Côté, 2016). Dalam penelitian ini, bukti mengenai penerimaan masyarakat terhadap kebijakan transparansi Filipina memberikan konteks penting, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa audiens telah menerima disinformasi digital sebagai ancaman eksistensial dalam pengertian teori sekuritisasi (Ibarra & Arugay, 2024). Dengan demikian, terdapat kesenjangan analitis antara upaya pemerintah mengonstruksikan ancaman dan pembuktian bahwa konstruksi tersebut telah memperoleh penerimaan audiens yang diperlukan untuk menghasilkan sekuritisasi yang berhasil.

Pada tingkat respons institusional, peluncuran rencana komunikasi *COMPLAN "Mulat"* oleh *Armed Forces of the Philippines* pada 28 Juni 2024, yang diberitakan pada 4 Juli 2024, memperlihatkan upaya institusional untuk meningkatkan transparansi, melawan disinformasi, dan memperkuat kesadaran publik mengenai hak serta kepentingan Filipina di Laut Filipina Barat (*Armed Forces of the Philippines*, 2024). Meskipun demikian, program tersebut belum dapat dikategorikan sebagai tindakan luar biasa (*extraordinary measures*) hanya berdasarkan tujuan dan keberadaannya. Penilaian mengenai sifat luar biasa suatu kebijakan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dasar hukum atau kelembagaannya, perubahan kewenangan, penyimpangan dari prosedur normal, serta hubungan antara keputusan kebijakan dan penerimaan audiens terhadap klaim ancaman. Oleh karena itu, *COMPLAN "Mulat"* dalam penelitian ini dipahami sebagai bukti adanya respons institusional yang terorganisasi, bukan sebagai bukti tunggal keberhasilan sekuritisasi.

Pada tataran kawasan, penelitian ini mengidentifikasi persoalan mengenai keterbatasan pendekatan kolektif ASEAN dalam menangani disinformasi lintas batas dan kontestasi narasi digital. ASEAN telah mengembangkan instrumen kebijakan terkait tata kelola informasi dan transformasi digital, termasuk *ASEAN Digital Masterplan 2025* dan *ASEAN Guideline on Management of Government Information in Combating Fake News and Disinformation in the Media* (Association of Southeast Asian Nations, 2021; Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia, 2024). Keberadaan instrumen tersebut menunjukkan adanya kerangka normatif untuk memperkuat pengelolaan informasi, koordinasi antarlembaga, transparansi, dan kolaborasi regional. Namun, keberadaan pedoman dan agenda kerja sama tidak otomatis membuktikan bahwa ASEAN telah memiliki mekanisme operasional yang efektif untuk menangani operasi pengaruh digital lintas negara. Demikian pula, respons nasional Filipina tidak dapat langsung diperlakukan sebagai respons kolektif ASEAN tanpa bukti mengenai keputusan, koordinasi, atau implementasi pada tingkat regional. Oleh sebab itu, implikasi penelitian bagi diplomasi digital ASEAN terletak pada pentingnya memperkuat mekanisme pertukaran informasi, koordinasi lintas negara, kapasitas verifikasi fakta, dan penanganan manipulasi informasi yang tetap memperhatikan transparansi serta akuntabilitas.

Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada kajian keamanan non-tradisional dengan menghubungkan studi disinformasi digital, konstruksi ancaman, dan teori sekuritisasi dalam konteks sengketa Laut China Selatan. Kontribusi utamanya bukan membuktikan bahwa seluruh proses sekuritisasi telah berhasil, melainkan menunjukkan pentingnya membedakan dokumentasi operasi disinformasi, tindakan aktor dalam membingkai ancaman, penerimaan audiens, dan legitimasi tindakan kebijakan sebagai tahapan analitis yang berbeda. Pembedaan ini membantu menghindari kesimpulan yang terlalu jauh dari bukti empiris dan menegaskan bahwa keberhasilan sekuritisasi harus dibuktikan melalui rangkaian bukti yang saling terhubung.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode desk research dan bergantung pada dokumen yang tersedia secara publik. Keterbatasan tersebut menyebabkan penelitian belum dapat memastikan secara menyeluruh bagaimana audiens menerima atau

menolak konstruksi ancaman yang disampaikan pemerintah Filipina, maupun apakah penerimaan tersebut secara langsung memengaruhi keputusan kebijakan. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan penelusuran proses (*process tracing*) untuk merekonstruksi hubungan antara pernyataan resmi, respons audiens, keputusan kebijakan, dan pelaksanaannya. Wawancara dengan pejabat terkait, analisis tanggapan publik, serta perbandingan dengan kasus disinformasi di negara anggota ASEAN lainnya juga dapat memperkuat pengujian terhadap mekanisme sekuritisasi. Dengan demikian, penelitian lanjutan tidak hanya menjelaskan bagaimana disinformasi dikonstruksikan sebagai ancaman, tetapi juga menguji kondisi yang memungkinkan konstruksi tersebut memperoleh penerimaan dan menghasilkan perubahan kebijakan.

## REFERENSI

- Association of Southeast Asian Nations (2015), "ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025," ASEAN Secretariat.
- Association of Southeast Asian Nations (2020), "ASEAN Guidelines on Management of Government Information in Combating Fake News and Disinformation Through the Media," ASEAN Secretariat.
- Association of Southeast Asian Nations (2021), "ASEAN Digital Masterplan 2025," ASEAN Secretariat. Tersedia pada: <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/08/ASEAN-Digital-Masterplan-2025.pdf>.
- Armed Forces of the Philippines (2024, 4 Juli), "AFP Presses Fight Against WPS Misinformation with Complan 'Mulat'," Tersedia pada: <https://www.afp.mil.ph/news/afp-presses-fight-against-wps-misinformation-with-complan-mulat>
- Balzacq, T. (2005), "The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context," *European Journal of International Relations*, 11(2), hlm. 171–201. Tersedia pada: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354066105052960>
- Bowen, G. A. (2009), "Document Analysis as a Qualitative Research Method," *Qualitative Research Journal*, 9(2), hlm. 27–40. Tersedia pada: <https://www.emerald.com/qrj/article-abstract/9/2/27/360733/Document-Analysis-as-a-Qualitative-Research-Method?redirectedFrom=fulltext>
- Bradshaw, S., & Howard, P. N. (2019), *The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation*, Oxford Internet Institute, University of Oxford.
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998), *Security: A New Framework for Analysis*, Lynne Rienner Publishers. Tersedia pada: <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9781685853808/html>
- Caballero-Anthony, M. (Ed.) (2016), *An Introduction to Non-Traditional Security Studies: A Transnational Approach*, SAGE Publications.
- Côté, A. (2016), "Agents Without Agency: Assessing the Role of the Audience in Securitization Theory," *Security Dialogue*, 47(6), hlm. 541–558. Tersedia pada: <https://academic.oup.com/sd/article-abstract/47/6/541/8369653?redirectedFrom=fulltext>
- Creswell, J. W. (2018), *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (edisi ke-5), SAGE Publications.
- European Parliamentary Research Service (2025), *Information Manipulation in the Age of Generative Artificial Intelligence*, European Parliament.
- Freedom House (2022), *Beijing's Global Media Influence: Philippines*. Tersedia pada: <https://freedomhouse.org/country/philippines/beijings-global-media-influence/2022>.

- Hansen, L., & Nissenbaum, H. (2009), "Digital Disaster, Cyber Security, and the Copenhagen School," *International Studies Quarterly*, 53(4), hlm. 1155–1175. Tersedia pada: <https://academic.oup.com/isq/articleabstract/53/4/1155/1815351?redirectedFrom=fulltext>
- Ibarra, E. J. A., & Arugay, A. A. (2024, 12 April), "Something Old, Something New: The Philippines' Transparency Initiative in the South China Sea," *ISEAS Perspective*, 2024(27). Tersedia pada: <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2024-27-something-old-something-new-the-philippines-transparency-initiative-in-the-south-china-sea-by-edcel-john-a-ibarra-aries-a-arugay/>.
- International Institute for Strategic Studies (2024), "Driving Wedges: China's Disinformation Campaigns in the Asia-Pacific," dalam *Asia-Pacific Regional Security Assessment 2024*, bab 5, Routledge for IISS.
- Juned, M. (2023), "Revisiting Asian Values in Southeast Asian's Cyberdemocracy Discourse," *Jurnal Wacana Politik*, 8(2), hlm. 154–165. Tersedia pada: <https://journal.unpad.ac.id/wacanapolitik/vol8/iss2/4/>
- Juned, M., Bainus, A., Saripudin, M. H., & Pratama, N. (2022), "The Dynamics of the USA and China Relations in the Cyberspace: Struggle for Power in a Global Virtual World in Building a Global Cyber Regime," *International Journal of Business and Globalisation*, 30(3–4), hlm. 396–414. Tersedia pada: <https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJBG.2022.123617>
- Llanita, L. N. (2024, 27 September), *Foreign Information Manipulation and Interference in the 2024 Taiwan Elections: Lessons and Ways Forward for the Philippines* (Executive Policy Brief No. 2024-05), National Defense College of the Philippines. Tersedia pada: <https://www.ndcp.edu.ph/foreign-information-manipulation-and-interference-in-the-2024-taiwan-elections-lessons-and-ways-forward-for-the-philippines/>.
- Meta (2020, September), *September 2020 Coordinated Inauthentic Behavior Report*. Tersedia pada: <https://about.fb.com/wp-content/uploads/2020/10/September-2020-CIB-Report.pdf>.
- Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia (2024), *ASEAN Guideline on Management of Government Information in Combating Fake News and Disinformation in the Media*, Association of Southeast Asian Nations. Tersedia pada: <https://asean.org/wp-content/uploads/2023/06/ASEAN-Guideline-in-Combating-Fake-News-and-Disinformation-in-the-Media-ISBN.pdf>.
- Misalucha-Willoughby, C. (2024), "From Entrepreneur to Saboteur: How the Philippines Won and Lost the South China Sea on Social Media," dalam A. A. Arugay & J. Encinas-Franco (Ed.), *Games, Changes, and Fears: The Philippines from Duterte to Marcos Jr.* (hlm. 59–83), ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Nimmo, B., Eib, C. S., & Ronzaud, L. (2020, 22 September), *Operation Naval Gazing*, Graphika. Tersedia pada: <https://www.graphika.com/reports/operation-naval-gazing>.
- Philippine Information Agency (2024a, 18 Maret), "NTF-WPS Calls for Public's Help in Combating Disinformation on West Philippine Sea." Tersedia pada: <https://pia.gov.ph/news/ntf-wps-calls-for-publics-help-in-combating-disinformation-on-west-philippine-sea/>.
- Philippine Information Agency (2024b, 12 Februari), "Task Force Launches Roadshow to Counter West Philippine Sea Misinformation." Tersedia pada: <https://pia.gov.ph/news/task-force-launches-roadshow-to-counter-west-philippine-sea-misinformation/>.
- Radio Free Asia (2025, 25 April), "China, ASEAN 'Committed' to Having Legally Binding Sea Code by 2026: Manila." Tersedia pada:

<https://www.rfa.org/english/southchinasea/2025/04/25/south-china-sea-code-of-conduct/>.

United Nations Development Programme (1994), *Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security*, Oxford University Press.

Wæver, O. (1995), "Securitization and Desecuritization," dalam R. D. Lipschutz (Ed.), *On Security* (hlm. 46–86), Columbia University Press.

Xiao, Y., & Watson, M. (2019), "Guidance on Conducting a Systematic Literature Review," *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), hlm. 93–112. Tersedia pada: <https://www.scribd.com/document/422052830/SLR-Guidance>

Yin, R. K. (2018), *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (edisi ke-6), SAGE Publications.